

Strategi Tata Kelola Kebijakan Mangrove Berbasis Masyarakat sebagai Ekowisata dan Mitigasi Abrasi di Kawasan Pesisir Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Megawati¹, Sumardi², Nasir³

Universitas Pancasakti, Makassar, Indonesia^{1,2,3}

Email Korespondensi Author: megawatiimam2@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Kata kunci:

Mangrove; Ekowisata;
Mitigasi Abrasi;
Implementasi Kebijakan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat sebagai upaya pengembangan ekowisata dan mitigasi abrasi di kawasan pesisir Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Pengelolaan mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi risiko abrasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan mangrove telah mengarah pada integrasi fungsi ekologis sebagai pelindung pesisir dari abrasi dengan fungsi ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi, tetapi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, fasilitas pendukung, dan tenaga pendamping, masih menjadi hambatan utama. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat, namun tingkat partisipasi masyarakat masih fluktuatif. Selain itu, struktur birokrasi telah mendukung koordinasi lintas pemangku kepentingan, tetapi sinkronisasi program antar lembaga masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pelembagaan partisipasi masyarakat agar pengelolaan mangrove sebagai ekowisata dan mitigasi abrasi dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi.

Keywords:

Mangroves; Ecotourism;
Coastal Abrasion
Mitigation; Policy
Implementation.

Abstrack

This study aims to analyze community-based mangrove governance strategies as an approach to developing ecotourism and mitigating coastal abrasion in the coastal area of East Sinjai District, Sinjai Regency. Mangrove management plays a strategic role in maintaining the balance of coastal ecosystems, reducing the risk of coastal abrasion, and improving community welfare through the development of community-based ecotourism founded on local potential. This study employed a qualitative descriptive method, using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that the implementation of mangrove management policies has integrated the ecological function of mangroves as natural coastal protection against abrasion with their economic function through the development of community-based ecotourism, although the implementation has not yet been fully optimized. Policy communication has been carried out through socialization and coordination; however, it has not reached all community members equally. Limited resources, particularly financial support, supporting facilities, and technical assistance personnel, remain the primary constraints. The disposition of policy implementers reflects a strong commitment from both the government and local communities; nevertheless, community participation remains uneven and fluctuates over time. Furthermore, the bureaucratic structure has facilitated coordination among stakeholders, although greater synchronization of programs across institutions is still required. This study concludes that strengthening policy communication, enhancing resource capacity, improving institutional coordination, and institutionalizing community participation are essential to achieving effective and sustainable community-based mangrove governance for ecotourism development and coastal abrasion mitigation while generating ecological, social, and economic benefits.

Pendahuluan

Ekosistem mangrove memegang peranan penting sebagai salah satu ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat signifikan bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Mangrove bertindak sebagai pelindung alami garis pantai dari berbagai ancaman seperti abrasi, intrusi air laut, gelombang pasang, serta badai, dan juga menyediakan habitat bagi berbagai jenis organisme laut yang mendukung produktivitas perikanan. Selain itu, mangrove memiliki kemampuan dalam menyerap dan menyimpan karbon (*blue carbon*) dalam jumlah substansial, berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global (Alongi, 2012; Donato et al., 2011). Oleh karena itu, keberadaan hutan mangrove seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aset lingkungan, melainkan juga sebagai modal untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir jika dikelola secara efektif (Barbier et al., 2011).

Meskipun perannya yang sangat strategis, ekosistem mangrove di berbagai belahan dunia masih menghadapi berbagai tekanan serius akibat konversi lahan, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, pembangunan kawasan pesisir, pencemaran lingkungan, serta dampak dari perubahan iklim. Degradasi ekosistem mangrove mengakibatkan peningkatan kerentanan wilayah pesisir terhadap abrasi, banjir rob, kehilangan habitat biota, serta penurunan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir (Friess et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove tidak dapat lagi dilakukan hanya dengan pendekatan konservasi saja, melainkan membutuhkan strategi tata kelola yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara berkelanjutan (FAO, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma pengelolaan sumber daya pesisir telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat pemerintahan (*government*) menuju tata kelola yang inklusif (*governance*), di mana berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dilibatkan. Pendekatan tata kelola kolaboratif diyakini lebih efektif dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, karena memberi kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pengelolaan mangrove, keterlibatan masyarakat lokal merupakan faktor kunci, mengingat masyarakat berinteraksi langsung dengan ekosistem mangrove setiap hari (Ostrom, 1990).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove berbasis masyarakat (*community-based mangrove management*) memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan konservasi dibandingkan dengan pendekatan yang sepenuhnya mengandalkan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Damastuti et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove berbasis masyarakat dapat meningkatkan perlindungan pesisir secara signifikan, jika didukung oleh kolaborasi antarlembaga, pendanaan yang memadai, serta komitmen jangka panjang. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove saja tidak cukup untuk mengatasi abrasi pada wilayah yang telah mengalami kerusakan berat, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan wilayah pesisir (Damastuti et al., 2023).

Di samping fungsi ekologis, mangrove juga memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata. Konsep ekowisata mangrove berkembang sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang menekankan pada prinsip konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal (The International Ecotourism Society, 2015). Ekowisata berbasis masyarakat memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi melalui penyediaan jasa wisata, pengelolaan kawasan, pengembangan produk lokal, serta kegiatan edukasi lingkungan tanpa merusak fungsi ekologis mangrove (Scheyvens, 1999). Dengan demikian, ekowisata dapat menjadi salah satu instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu menghubungkan kepentingan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Perkembangan konsep ekowisata saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga lebih pada penguatan tata kelola kelembagaan, kolaborasi multipihak, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian Mardianton et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan ekowisata mangrove sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan destinasi wisata. Semakin baik sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku

kepentingan lainnya, semakin tinggi pula tingkat keberlanjutan kawasan ekowisata mangrove (Mardianton et al., 2024).

Di Indonesia, pengelolaan mangrove menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, mengingat negara ini memiliki kawasan mangrove terluas di dunia. Pemerintah terus mendorong rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana pesisir, serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021; FAO, 2020). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kebijakan, kapasitas kelembagaan, kesinambungan pendanaan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan mangrove (Friess et al., 2019; Barbier et al., 2011).

Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi ekosistem mangrove yang besar, terutama di Kecamatan Sinjai Timur. Kawasan ini berfungsi strategis sebagai pelindung pantai dari abrasi dan memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi mangrove dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam konservasi kawasan pesisir. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi mangrove, serta belum terlembaganya partisipasi masyarakat secara berkelanjutan (Ostrom, 1990; Ansell & Gash, 2008). Kondisi ini menyebabkan potensi mangrove sebagai instrumen mitigasi abrasi dan penggerak ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem mangrove harus bertumpu pada kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian Aji et al. (2026) mengungkapkan bahwa tata kelola destinasi ekowisata mangrove sering kali masih didominasi oleh kepentingan ekonomi, sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menandakan perlunya model tata kelola yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial dalam pengelolaan kawasan mangrove. Selain itu, penelitian mengenai strategi pengelolaan mangrove berkelanjutan di Karangsong menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan merupakan aspek yang paling menentukan keberhasilan konservasi, lebih dari sekadar dimensi ekologis. Peningkatan kapasitas masyarakat, koordinasi antarlembaga, pengembangan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas atraksi wisata menjadi strategi prioritas dalam mewujudkan ekowisata mangrove yang berkelanjutan (Prihadi et al., 2024; Susana et al., 2020).

Berdasarkan uraian ini, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek ekologis rehabilitasi mangrove atau manfaat ekonomi ekowisata, sementara kajian mengenai strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat yang mengintegrasikan dimensi implementasi kebijakan, penguatan kelembagaan, mitigasi abrasi, dan pengembangan ekowisata masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Kabupaten Sinjai. Kesenjangan ini menjadi dasar penting untuk penelitian lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat sebagai upaya pengembangan ekowisata dan mitigasi abrasi di Kecamatan Sinjai Timur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model tata kelola pesisir yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan, serta menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan mangrove.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi pengelolaan kebijakan mangrove yang berorientasi pada masyarakat sebagai langkah penting dalam pengembangan ekowisata serta mitigasi abrasi di kawasan pesisir Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Informan yang terlibat dalam penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling*, yang mencakup berbagai pihak, antara lain unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola kawasan mangrove, tokoh masyarakat, kelompok sadar wisata, serta masyarakat pesisir yang berpartisipasi

dalam pengelolaan mangrove. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Analisis data mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al. (2014), yang mencakup proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan beberapa teknik triangulasi, meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin kredibilitas, konsistensi, dan validitas dari temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

Hasil dan Diskusi

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan mangrove di Kecamatan Sinjai Timur telah berupaya untuk mengintegrasikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial secara holistik dalam konteks pembangunan wilayah pesisir. Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup, kelautan, perikanan, dan pariwisata, telah melaksanakan serangkaian program yang mencakup rehabilitasi mangrove, konservasi kawasan pesisir, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan, sekaligus, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Pendekatan ini menandakan bahwa pengelolaan mangrove telah bertransformasi dari sekadar kegiatan restorasi lingkungan menjadi instrumen pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama dalam aspek perlindungan ekosistem pesisir, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (Friess et al., 2024).

Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove kini tidak hanya dipahami sebagai aktivitas rehabilitasi lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pembangunan yang mengintegrasikan konservasi, mitigasi abrasi, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsi ekologis mangrove sangat signifikan sebagai penyerap karbon (*blue carbon*), pelindung garis pantai dari abrasi dan gelombang pasang, habitat bagi berbagai jenis biota laut, serta penyangga produktivitas perikanan pesisir. Di sisi ekonomi, keberadaan mangrove menawarkan nilai melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengembangan ekowisata yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan (Worthington & Spalding, 2023).

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan paradigma *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) dan manajemen berbasis ekosistem yang menempatkan masyarakat sebagai aktor sentral dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, keberhasilan pengelolaan mangrove sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk membangun sinergi dengan masyarakat lokal, kelompok tani hutan, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Keterlibatan beragam aktor ini memungkinkan terbentuknya mekanisme pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap kawasan mangrove. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik melalui dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama. Lebih lanjut, Emerson dan Nabatchi (2015) menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga merupakan fondasi utama dalam menyelesaikan isu lingkungan yang kompleks, karena memungkinkan integrasi sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan dalam proses implementasi kebijakan.

Kajian global mengenai tata kelola mangrove menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi lebih ditentukan oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, integrasi kebijakan lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat, ketimbang hanya mengandalkan keberadaan regulasi formal. Pendekatan restorasi mangrove yang efektif adalah yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara simultan. Worthington dan Spalding (2023) juga menekankan bahwa restorasi mangrove akan memberikan manfaat jangka panjang apabila didukung oleh tata kelola adaptif, pendanaan berkelanjutan, serta sistem pemantauan yang melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengelola kawasan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan mangrove di Kecamatan Sinjai Timur belum sepenuhnya optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, koordinasi kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Dalam hal komunikasi, masih terdapat segmen masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi mangrove. Ketidaktahuan ini menyebabkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai fungsi kawasan mangrove, sehingga sebagian masyarakat masih memanfaatkan kawasan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan yang signifikan yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran, tenaga pendamping lapangan, fasilitas rehabilitasi, serta kapasitas sumber daya manusia mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Literatur mengenai implementasi kebijakan kontemporer menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, kemampuan organisasi dalam beradaptasi, serta dukungan sumber daya yang memadai (Howlett, Ramesh, & Perl, 2020; Weible & Sabatier, 2018). Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah menjadi faktor strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan mangrove.

Lebih lanjut, koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya terintegrasi. Setiap organisasi perangkat daerah masih menjalankan program sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga belum semua kegiatan memiliki mekanisme koordinasi yang berkelanjutan. Padahal, pengelolaan mangrove merupakan isu lintas sektor yang memerlukan integrasi kebijakan antara bidang lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga perencanaan pembangunan daerah. Emerson dan Nabatchi (2015) menekankan bahwa tata kelola kolaboratif yang efektif harus didukung oleh koordinasi kelembagaan yang kuat, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan agar dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif.

Partisipasi masyarakat juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian kelompok masyarakat telah berperan aktif dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengawasan kawasan, serta pengembangan ekowisata mangrove. Namun, masih terdapat masyarakat yang berpartisipasi secara pasif dan hanya terlibat saat ada bantuan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat masih memerlukan penguatan, melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan, pengembangan kelembagaan lokal, serta pemberian insentif ekonomi yang dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan kawasan mangrove. Menurut Armitage et al. (2022), keberhasilan pengelolaan sumber daya pesisir sangat dipengaruhi oleh kapasitas adaptif masyarakat, pembelajaran sosial, dan kolaborasi multipihak yang memungkinkan masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan mangrove tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Implementasi kebijakan memerlukan dukungan komunikasi yang efektif, kapasitas kelembagaan yang kuat, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi tata kelola mangrove di Kecamatan Sinjai Timur perlu dikembangkan melalui pendekatan *collaborative governance* dan *adaptive governance* yang memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, kelompok pengelola, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam suatu sistem kolaboratif yang saling mendukung. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sekaligus mewujudkan pengelolaan mangrove yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta pembangunan wilayah pesisir di masa depan.

Strategi Tata Kelola Kebijakan Pengelolaan Mangrove

Berdasarkan hasil penelitian, strategi pengelolaan kebijakan mangrove di Kecamatan Sinjai Timur ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, kelompok tani hutan, kelompok sadar wisata, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Strategi ini direalisasikan melalui berbagai kegiatan, termasuk rehabilitasi kawasan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekowisata, peningkatan kapasitas

kelompok pengelola, serta koordinasi lintas sektor dalam program konservasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove tidak semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk pengelolaan bersama (*shared governance*) yang melibatkan berbagai aktor sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan yang diimplementasikan berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, terutama dalam penanaman kembali mangrove, pemeliharaan kawasan rehabilitasi, pengawasan kerusakan lingkungan, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Namun, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan koordinasi antarorganisasi, integrasi program yang belum optimal antara perangkat daerah, keterbatasan pendanaan, dan belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan pengelolaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek kelembagaan, koordinasi, dan keberlanjutan kebijakan.

Dalam konteks *adaptive governance*, strategi pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menekankan pentingnya aturan formal, tetapi juga kemampuan kelembagaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi. Folke et al. (2005) menjelaskan bahwa tata kelola adaptif adalah pendekatan yang mengintegrasikan pembelajaran sosial, fleksibilitas kelembagaan, serta kolaborasi multipihak dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan mangrove sebagai sistem sosial-ekologis yang dinamis memerlukan strategi kebijakan yang responsif terhadap perubahan lingkungan, tekanan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat lokal dengan cara yang berkelanjutan. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam penelitian ini menunjukkan adanya embrio tata kelola adaptif, meskipun mekanisme pembelajaran bersama dan evaluasi kebijakan masih perlu diperkuat.

Strategi pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor juga konsisten dengan konsep *polycentric governance* yang dikembangkan oleh Ostrom (2010). Menurut Ostrom, pengelolaan sumber daya bersama lebih efektif bila melibatkan berbagai pusat pengambilan keputusan yang saling berkoordinasi, bukan tergantung pada satu institusi tunggal. Dalam pengelolaan mangrove di Kecamatan Sinjai Timur, pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara pemerintah desa, kelompok tani hutan, kelompok sadar wisata, dan masyarakat bertindak sebagai pelaksana di lapangan. Pembagian peran ini menciptakan sistem tata kelola yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan legitimasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor belum optimal. Beberapa program rehabilitasi dilaksanakan secara sektoral, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kegiatan dan ketidaksesuaian prioritas pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tata kelola belum sepenuhnya mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam kerangka pengelolaan yang terpadu. Carlisle dan Gruby (2019) menyatakan bahwa kelemahan koordinasi merupakan salah satu hambatan dalam tata kelola sumber daya pesisir, menyebabkan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan dan meningkatnya biaya koordinasi antarorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dengan penyusunan rencana aksi bersama, pembagian kewenangan yang jelas, dan penguatan forum koordinasi lintas sektor.

Selain aspek kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pengelolaan juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas masyarakat lokal. Kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan cenderung lebih aktif dalam pengelolaan kawasan mangrove dibandingkan dengan kelompok yang belum memperoleh penguatan kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dari strategi tata kelola. Armitage et al. (2009) menjelaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran kolektif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri dan memperkuat ketahanan kelembagaan lokal terhadap perubahan lingkungan.

Strategi pengelolaan mangrove juga perlu diintegrasikan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek konservasi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mangrove mulai memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, meskipun kontribusinya masih terbatas. Oleh karena itu, strategi konservasi akan lebih diterima jika memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. DasGupta dan Shaw (2017) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan mangrove sangat dipengaruhi oleh kemampuan

pemerintah dalam mengintegrasikan tujuan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan. Dengan demikian, konservasi tidak hanya dilihat sebagai pembatas aktivitas ekonomi, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, tantangan perubahan iklim semakin mendesak perlunya strategi tata kelola yang mampu meningkatkan resiliensi kawasan pesisir. Mangrove memiliki fungsi strategis sebagai penyerap karbon, pelindung pantai, dan benteng alami terhadap gelombang ekstrem. Oleh karena itu, pengelolaan mangrove perlu diintegrasikan dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah. Alongi (2015) menegaskan bahwa keberhasilan konservasi mangrove di masa depan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi lokal dalam satu kerangka kebijakan yang saling mendukung. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas tata kelola sekaligus memperkuat kontribusi mangrove terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi tata kelola pengelolaan mangrove di Kecamatan Sinjai Timur menunjukkan kemajuan melalui kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Namun, efektivitas strategi ini masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan, sistem monitoring dan evaluasi, serta integrasi kebijakan dan pembiayaan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme tata kelola mangrove yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan melalui penguatan sinergi antarorganisasi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga vertikal, sektor swasta, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat. Sinergi tersebut penting agar setiap aktor memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, sehingga pelaksanaan program konservasi dapat berjalan terkoordinasi dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan teknis, pendidikan lingkungan, dan penguatan kelembagaan kelompok pengelola mangrove agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan secara mandiri. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, mencakup aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga keberhasilan program dapat dievaluasi secara objektif dan menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Selain itu, pengelolaan mangrove perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sehingga konservasi mangrove menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah dengan kepastian regulasi dan dukungan anggaran. Dengan pendekatan ini, tata kelola mangrove tidak hanya berorientasi pada pelestarian fungsi ekologis sebagai pelindung wilayah pesisir dan penyerap karbon, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim, mengurangi risiko bencana pesisir, menciptakan peluang ekonomi melalui pengembangan ekowisata dan usaha berbasis mangrove, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui prinsip pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan kebijakan mangrove di Kecamatan Sinjai Timur telah mengarah pada penerapan tata kelola yang lebih kolaboratif. Hal ini tercermin dari pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani hutan, kelompok sadar wisata, tokoh masyarakat, serta masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, rehabilitasi, dan pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Pelaksanaan kebijakan ini telah menghasilkan dampak positif, yang ditunjukkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran ekologis mangrove sebagai pelindung kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon, habitat biota pesisir, dan sebagai sumber ekonomi alternatif yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Walaupun demikian, implementasi strategi tata kelola masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya mencakup ketidakefektifan koordinasi antarorganisasi, keterbatasan kapasitas

kelembagaan serta sumber daya, komunikasi yang belum berlangsung secara berkelanjutan, dan ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola sangat diperlukan melalui peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal, penyempurnaan mekanisme komunikasi dan evaluasi berbasis indikator kinerja, serta integrasi pengelolaan mangrove ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan adaptasi perubahan iklim. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan mangrove di Kecamatan Sinjai Timur diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara tujuan konservasi lingkungan, peningkatan ketahanan wilayah pesisir, serta pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa ekosistem mangrove tetap memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Referensi

- Alongi, D. M. (2012). Carbon sequestration in mangrove ecosystems. *Carbon Management*, 3(3), 225-232.
- Alongi, D. M. (2015). The impact of climate change on mangrove forests. *Oceanography and Marine Biology: An Annual Review*, 53, 1-36.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Aji, A. R., et al. (2026). Community participation in mangrove tourism management: A case study in Indonesia. *International Journal of Tourism Research*.
- Barbier, E. B., et al. (2011). Coastal ecosystem-based adaptation and the role of mangroves in climate change mitigation. *Ecological Economics*, 70(11), 2075-2084.
- Carlisle, K. J., & Gruby, R. L. (2019). The challenge of governance in complex systems: A multi-level perspective on coastal management. *Environmental Management*, 63(5), 715-726.
- Damastuti, E., et al. (2023). Community-based mangrove management and its impact on coastal protection. *Journal of Coastal Conservation*.
- DasGupta, S., & Shaw, R. (2017). Ecosystem-based adaptation: A review of concepts and applications. *Climate Policy*, 17(1), 75-88.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. *Georgetown University Press*.
- FAO. (2020). The state of the world's forests 2020: Forests, biodiversity and people. *Food and Agriculture Organization*.
- Folke, C., et al. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441-473.
- Friess, D. A., et al. (2019). Global trends in mangrove forest restoration. *Nature Sustainability*, 2, 1-7.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. University of Toronto Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Rencana aksi nasional pengelolaan mangrove. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*.
- Mardianton, A., et al. (2024). Governance structures and ecotourism development in mangrove areas. *Journal of Sustainable Tourism*.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. *Cambridge University Press*.
- Ostrom, E. (2010). The challenge of common-pool resources. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 52(4), 8-25.
- Prihadi, J., et al. (2024). Institutional dimensions of sustainable mangrove management in Indonesia. *Forest Policy and Economics*.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management*, 20(2), 245-249.
- Susana, A., et al. (2020). Enhancing community participation in mangrove conservation: Lessons learned from Indonesia. *Environmental Science & Policy*.
- The International Ecotourism Society. (2015). *Ecotourism: Principles, practices, and policies for sustainability*.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2018). *Theories of the policy process*. Westview Press.
- Worthington, T., & Spalding, M. (2023). Sustainable management of mangrove ecosystems: Challenges and opportunities. *Global Ecology and Conservation*, 45, e02217.